

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

1. Definisi Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Dalam menjalankan kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen moneter yaitu operasi pasar terbuka atau *Open Market Operation* (OPT), Giro Wajib Minimum (GWM), fasilitas diskonto, dan intervensi mata uang asing. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh bank sentral dalam menjalankan operasi pasar terbuka.

Peraturan Bank Indonesia nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menyatakan bahwa SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan berfungsi sebagai salah satu piranti dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT).¹³ Sedangkan Peraturan Bank Indonesia nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah menyatakan bahwa SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek

¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/ 10 /PBI/2002 Tentang Sertifikat Bank Indonesia, *Pasal 1 dan Pasal 2*, Hal.3.

dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad Jua'lah.¹⁴

Berdasarkan pernyataan diatas SBIS dibuat oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektifitas mekanisme moneter dengan prinsip syariah. Kedua instrumen ini memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai instrumen Operasi Pasar Terbuka dalam rangka pengendalian moneter dengan tujuan akhir kestabilan nilai rupiah dan tingkat inflasi.

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Bank Indonesia menerbitkan SBI dan SBIS dan menjualnya pada masyarakat akan menyebabkan jumlah uang beredar dimasyarakat berkurang. Menurut Rahardjo dan Manurung, menurunkan Jumlah Uang Beredar (JUB) adalah salah satu target yang ingin dicapai dalam menetapkan kebijakan kontraktif.¹⁶ Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian berjalan terlalu kuat dan menyebabkan inflasi. Sehingga harapannya ketika JUB berkurang akan menekan permintaan masyarakat akan barang yang merupakan

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/ 11 /PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, *Pasal 2 dan Pasal 3*, Hal.4.

¹⁵ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), Hal. 298.

¹⁶ Pratama Rahardja, dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,2001), Hal.359.

faktor penyebab terjadinya *Demand Pull Inflation* sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Maka dapat disimpulkan pengaruh SBI dan SBIS dengan tingkat inflasi adalah berpengaruh negatif atau tidak searah.

2. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sesuai dengan peraturan PBI No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syaria'ah, SBIS ini diterbitkan dengan akad ju'alah mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹⁷

- 1) Untuk setiap satu unit seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pengajuan penawaran SBIS dari peserta lelang paling sedikit 1.000 unit seharga Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan 100 unit atau senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 2) Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).

Warkat disini yang dimaksud adalah SBIS ini diterbitkan tanpa menggunakan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat dengan nilai nominal tertentu yang berfungsi sebagai uang, namun cukup dengan bukti kepemilikan yang berupa rekening surat berharga di Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yaitu sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga yang

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/ 11 /PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, *Pasal 2 dan Pasal 3*, Hal.8.

dilakukan secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta dan Bank Indonesia.

- 3) Berjangka waktu paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan.

Jangka waktu Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah ini dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan di hitung satu hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

- 4) Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.

Bank Umum Syari'ah (BUS) atau Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang memiliki Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dapat mengagunkan SBIS kepada Bank Indonesia dalam transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) dengan persyaratan dokumen pengajuan repo SBIS sebagai berikut:

- a) BUS atau UUS mengajukan Repo SBIS setelah menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan repo SBIS (perjanjian pengagunan SBIS, foto copy anggaran dasar bank, foto copy identitas diri) yang dibubuhi materai cukup dan tandatangani oleh direksi bank disertai dengan surat pengantar.
- b) Khusus untuk UUS, perjanjian dapat di tanda tangani oleh pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi bank.

c) Dokumen tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia. Direktorat Pengelolaan Moneter dan bank Indonesia memberitahukan kepada BUS atau UUS mengenai persetujuan Pemberian Repo SBIS oleh Bank Indonesia dapat diberikan paling banyak sebesar nilai nominal SBIS, dengan jangka waktu Repo SBIS adalah satu 1 hari kerja dengan mengenakan Perhitungan biaya Repo SBIS yang harus dibayarkan karena BUS atau UUS tidak menepati jangka waktu kesepakatan dalam transaksi SBIS. Rumus tingkat biaya Repo SBIS = $(BI\ rate + 300bps) + (t:360) \times (\text{nilai nominal repo SBIS})$

5) Tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder.

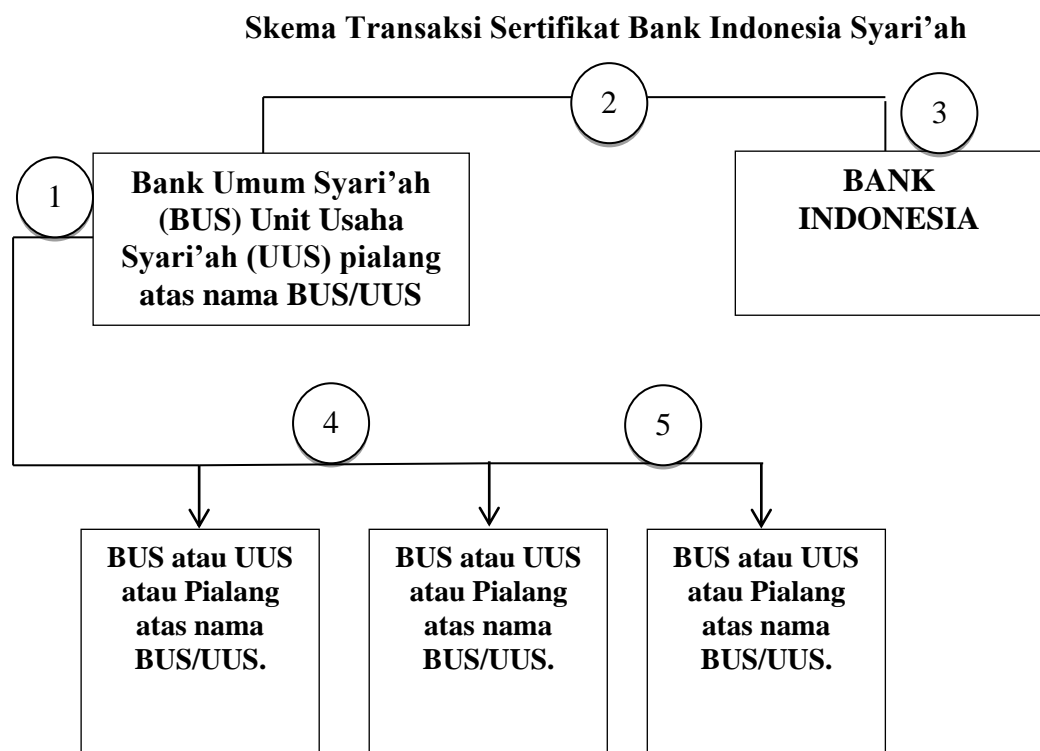
Pasar sekunder atau secondary market adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan setelah penawaran umum perdana dilaksanakan. Atau pasar yang telah mencatat sekuritas yang dapat diperjual belikan sehingga memberikan kesempatan/mempermudah investor untuk melakukan transaksi perdagangan baik membeli ataupun menjual dibursa tersebut pada saat saham terdaftar dibursa efek.¹⁸

3. Mekanisme Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah

¹⁸ Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM tentang Cara Transaksi Repo. Hal.4.

Mekanisme penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah adalah melalui lelang. Dalam hal penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah melalui lelang telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM pada 31 Maret 2008. Berikut prosedur pelaksanaan transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dengan sistem pelelangan:¹⁹

Gambar.2.1.



Keterangan:

1. Bank Indonesia memberitahukan dan menetapkan waktu pengajuan

¹⁹ Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM tentang Transaksi Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Hal.8.

lelang (window time), imbalan, jangka waktu dan sebagainya kepada BUS, UUS atau pialang atas nama BUS, UUS.

2. BUS, UUS dan pialang atas nama BUS/UUS mengajukan penawaran pembelian Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah ke Bank Indonesia.
3. Dewan Gubernur 4 memutuskan pemenang lelang.
4. Bank Indonesia Melakukan perhitungan tingkat imbalan SBIS melalui BI-SSSS dan mendebet saldo sekening giro pada BUS, UUS atau pialang yang memenangkan lelang SBIS tersebut.
5. Setelah jatuh tempo Bank Indonesia membayar SBIS tersebut dengan mengkredit rekening giro sebesar nilai nominal + imbalan dalam rangka setelmen dana.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tahap-tahap pelelangan dalam Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah, sebagai berikut:²⁰

- 1) Imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah Bank syari'ah membayar imbalan atas SBIS milik BUS atau UUS pada saat SBIS jatuh waktu / tempo. Tingkat imbalan mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan

²⁰ Surat Edaran Bank Indonesia No.10/16/DPM tentang SBIS. Hal.4.

tingkat diskonto hasil lelang SBI.

- b) Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *variable rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

2) Ketentuan dan Persyaratan Lelang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah.

- a) Peserta lelang SBIS adalah BUS, UUS dan pialang (atas nama BUS atau UUS) yang melakukan transaksi dengan Bank Indonesia.
- b) BUS atau UUS yang mengajukan untuk mengikuti lelang SBIS harus memiliki FDR (Financing to Deposit Ratio) paling sedikit 80% berdasarkan perhitungan yang dilakukan Bank Indonesia.
- c) BUS atau UUS yang melakukan transaksi SBIS wajib memiliki rekening giro dan rekening surat berharga dengan nilai saldo yang cukup pada rekening giro.
- d) Bank Indonesia membuka window lelang SBIS pada hari Rabu dengan waktu pengajuan transaksi mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 12.00WIB, atau pada hari kerja lain dengan window time yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e) Tanggal jatuh waktu SBIS ditetapkan pada hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur,

apabila diperlukan Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal jatuh waktu pada hari kerja lain.

3) Pengumuman Rencana Lelang SBIS.

Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBIS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang SBIS melalui BISSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memuat antara lain: BUS atau UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS, Jangka waktu SBIS, jatuh waktu SBIS, seri SBIS, Tingkat imbalan, tanggal transaksi, tanggal setelmen.

4) Pengajuan Penawaran Lelang SBIS.

Pada hari pelaksanaan lelang SBIS yang ditetapkan, peserta langsung mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank Indonesia Direktorat Pengelolaan Moneter melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengajuan penawaran lelang minimal Rp.1.000.000.000,-/1000 unit (satu milyar per seribu unit) dengan kelipatan 100 unit atau Rp.100.000.000,-

5) Penetapan pemenang lelang SBIS.

Bank Indonesia menetapkan pemenang lelang SBIS berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional dan Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS apabila penawaran yang masuk dinilai berada diluar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas.

6) Pelunasan SBIS.

Bank Indonesia melakukan Pelunasan SBIS apabila sudah jatuh tempo dengan mengkredit rekening giro sebesar nilai SBIS ditambah imbalan yang diperoleh.

7) Sanksi.

Sanksi dapat diberikan oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS apabila saldo rekening giro yang dimiliki tidak mencukupi sehingga dilakukan pembatalan oleh Bank Indonesia dengan memberikan sanksi berupa:

- a) Teguran tertulis, dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah (DPbS) dan tim pengawas bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat.
- b) Kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per seribu) dari nilai nominal SBIS.
- c) Pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya dan larangan mengajukan repo SBIS selama 5 (lima) hari berturut-turut.

B. Inflasi

1. Definisi Inflasi

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang dan jasa secara kontinyu dalam waktu tertentu. Inflasi menurut definisi Budiono adalah kenaikan hampir semua barang yang terjadi secara menerus

dalam jangka waktu yang lama.²¹ Inflasi tidak bisa samakan dengan kenaikan harga barang dan jasa secara spontan semisal pada hari besar keagamaan.

Bertambahnya uang dimasyarakat akan memicu perilaku konsumtif sehingga masyarakat akan cenderung membelanjakan barang dan jasa secara terus menerus sehingga berpengaruh pada kurangnya penawaran barang sehingga memicu kelangkaan. Inflasi sesuai dengan hukum ekonomi dimana kelangkaan barang memicu kenaikan harga. Kenaikan inflasi secara terus menerus akan menggerus kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penyusutan nilai mata uang sehingga daya beli masyarakat tidak lagi menjangkau harga-harga barang.

2. Jenis-jenis Inflasi

Berdasarkan sifatnya Nanga membagi inflasi ke dalam tiga tingkatan yaitu:²²

a) Inflasi Sedang (*Moderate Inflation*)

Kondisi ini ditandai dengan kenaikan laju inflasi yang lambat dan waktu yang relatif lama.

b) Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)

Kondisi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang *relative* pendek serta mempunyai sifat

²¹Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No: 2; Ekonomi Makro*, (Yogyakarta:BPFE,1997) edisi keempat, Hal.24.

²² Muana Nanga, *Teori Makro Ekonomi*, (Yogyakarta:BPFE,2005) Edisi ke-4, Hal.251.

akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan inilebih tinggi dari minggu atau bulan yang lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.

c) *Inflasi Tinggi (hyper inflation)*

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi punya keinginan untuk menyimpan uang kerana nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang.

Berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga – harga yang berlaku, inflasi dibedakan dalam dua spesifikasi yaitu dilihat dari sebab awal inflasi dan ditinjau dari asal inflasi, yang dijabarkan sebagai berikut:²³

a) *Demand-Pull Inflation*

Demand-pull Inflation disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang – barang (*aggregate demand*) bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

b) *Cost Push Inflation*

²³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ke-tiga*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), Hal.288.

Inflasi jenis *Cost Push Inflation* terjadi karena kenaikan biaya produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara- negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supplyshocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga – harga berbagai barang.

Berdasarkan asal-usulnya, maka inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).²⁴

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).

Inflasi ini disebabkan oleh adanya *shock* dari dalam negeri, baik karena tindakan masyarakat maupun tindakan pemerintah

²⁴ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, (Yogyakarta:BPFE,1994). Hal.128.

dalam melakukan kebijakan-kebijakan perekonomian.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

Imported inflation adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang-barang impor yang selanjutnya juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang input produksi yang masih belum bisa diproduksi secara domestik.

3. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian

Dampak inflasi terhadap perekonomian yaitu:

a. Inflasi mengurangi minat masyarakat menabung.²⁵

Hal ini dikarenakan ketakutan akan nilai penyusutan nilai mata uang dan lebih membelanjakan uangnya.

b. Mengurangi institusi perbankan dalam memberikan kredit.

c. Mengurangi kredit investasi dan kredit produktif yang berkaitan dengan modal usaha karena akan memaju peredaran uang yang tinggi sehingga inflasi tidak lagi bisa dikontrol.

d. Inflasi menyebabkan penerimaan pajak pemerintah lebih tinggi akan tetapi menggerus gairah ekonomi karena tagihan pajak akan meningkat.

e. Inflasi cenderung menguntungkan peminjam atau debitur dan sebaliknya merugikan masyarakat atau lembaga yang meminjamkan uang.

²⁵ Rafiq al-Masri, *a paper submitted in the second Workshop on inflation: Inflation and Its Impact on Societies – The Islamic Solution, dalam Teori Makro Islam : Konsep, Teori dan Analisis*, ed. M. Nur Riando Al Arif (Bandung: ALFABETA, 2010), Hal.100.

C. Nilai Tukar Rupiah/Kurs (*Exchange Rate*)

1. Definisi Nilai Tukar Rupiah/Kurs (*Exchange Rate*)

Nilai tukar rupiah merupakan bagian dari transaksi valuta asing (*valas*). Nilai tukar adalah mata uang domestik yang harus ditukarkan untuk mendapatkan mata uang asing.²⁶

Dalam fluktuasi mata uang sering terdengar istilah apresiasi dan depresiasi. Apresiasi merupakan penguatan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sedangkan depresiasi merupakan penurunan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing.²⁷ Dalam konteks rupiah, apresiasi merupakan penguatan tukar sedangkan depresiasi merupakan penurunan nilai tukar.

Dalam rangka pencapaian target kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka dan operasi pasar terbuka syariah dengan instrumen SBI dan SBIS akan mempengaruhi tingkat imbal hasil pada transaksi pasar uang antar bank syariah, dan transaksi pasar uang antar bank syariah akan berpengaruh terhadap pembiayaan dalam sektor riil sehingga dapat mempengaruhi inflasi dan nilai tukar rupiah yang keduanya merupakan sasaran kebijakan moneter. Sedangkan inflasi dan nilai tukar rupiah merupakan variabel makro yang sangat

²⁶ Richard G. Lipsey dkk, *Pengantar Makro Ekonomi*,(Jakarta: Erlangga, 1992),Ed ke-8, hal. 379

²⁷ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*,(Jakarta:erlangga, 2003),edisi kedua, hal.221

mungkin mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti transaksi pasar uang antar bank syariah.²⁸

2. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

a. Transaksi *Spot*

Transaksi *Spot* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

b. Transaksi *Forward*

Transaksi *Forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

²⁸ M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), Hal.154.

c. Transaksi *Swap*

Transaksi *Swap* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

d. Transaksi *Option*

Transaksi *Option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).²⁹

3. Dampak yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi dengan berbagai cara, yakni bisa dengan cara dilakukan secara resmi oleh pemerintah suatu negara yang menganut sistem *Managed Floating Exchange Rate*, atau bisa juga karena tarik menariknya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar (*Market Mechanism*) dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena lima hal, yaitu:

1. Tingkat Inflasi
2. Tingkat Suku Bunga
3. Jumlah Uang Beredar (JUB)
4. Pendapatan Nasional.

²⁹ Ibid., Hal.4.

5. Posisi neraca pembayaran internasional Indonesia (BOP)³⁰

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.³¹

D. Produk Domestik Bruto

1. Definisi Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan ekonomi disebuah negara adalah masalah perekonomian jangka panjang. Selain itu pertumbuhan ekonomi, juga bisa dijadikan alat ukur untuk melihat dan menganalisa tingkat perkembangan perekonomian dinegara tersebut.

Menurut Sukirno, bahwa dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produk barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan

³⁰ Kemu, S. Z. dan Ika, S, *Kajian Ekonomi Keuangan*, (Jakarta, Desember 2016) Vol. 20 No. 3, Hal.262.

³¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), Hal.3.

produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal.³² Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu, untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

Pertumbuhan ekonomi juga bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Produk Domestik Bruto di Indonesia adalah akumulasi penambahan nilai barang dan jasa di Indonesia, baik itu dari WNI maupun WNA, Komponen penghitungan PDB meliputi Lembaga keuangan, eksplorasi tambang, jasa komunikasi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Menurut *McEachern*, Produk Domestik Bruto/GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh

³² Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008) Hal.423.

sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.³³

Menurut Sukirno, yaitu Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, dan perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu.³⁴

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB sebuah negara dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Karena begitu pentingnya peran PDB di dalam suatu perekonomian, maka perlu kiranya untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Produk Domestik Bruto.

³³ McEachern, A. W, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat,2000), Hal.31.

³⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ke-tiga*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), Hal.71.

2. Metode dan Komponen Perhitungan Pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB).

Salah satu metode perhitungan produk domestik bruto, yaitu dengan metode pengeluaran (*expenditure method*). Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu.

Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian:

- a. Konsumsi Rumah Tangga/ *Household Consumption* (C)
- b. Konsumsi Pemerintah/ *Government Consumption* (G)
- c. Pengeluaran Investasi/ *Investment Expenditure* (I)
- d. Ekspor Neto/ *Net Export* (X – M)

Metode perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:

$$\text{PDB} = C + G + I + (X - M)$$

Dimana:

C = konsumsi rumah tangga

G = konsumsi / pengeluaran pemerintah

I = PMTDB

X = ekspor

M = impor³⁵

Adapun komponen dari pada perhitungan PDB berdasarkan

³⁵ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi & Makroekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008). Hal. 234.

pengeluaran adalah sebagai berikut:

a) Konsumsi Rumah Tangga (*Household Consumption*)

Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang (*durable goods*) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/ barang tahan lama (*non-durable goods*).

b) Konsumsi Pemerintah (*Government Consumption*)

Konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir (*government expenditure*). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah. Itulah sebabnya dalam data statistik PDB, pengeluaran konsumsi pemerintah nilainya lebih kecil daripada pengeluaran yang tertera dalam anggaran pemerintah (sisi pengeluaran anggaran negara).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk pijakan teoritis penelitian selanjutnya. Berberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan konteks penelitian saat ini adalah:

1. Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Duwik Tri Utami dan Fitrah Sari Islami

Penelitian ini memiliki kesamaan yang dilakukan oleh utami dan islami yaitu sama-sama menggunakan variable independen seperti Inflasi,

Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, serta cadangan devisa. dan sama-sama menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel- variabel ekonomi (Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, Cadangan Devisa) baik secara signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah.

Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada penambahan variable independen, pada penelitian yang dilakukan oleh utami dan islami terdapat beberapa penambahan variable independen lainnya yaitu Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga SBI, serta cadangan devisa. Lalu variable dependennya adalah Nilai Tukar Rupiah. Sedangkan penelitian ini menambahkan variable independen lain yaitu Produk Domestik Bruto dan Nilai Tukar Rupiah lalu menggunakan variable dependen Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Hasilnya yaitu terdapat hubungan jangka pendek juga jangka panjang. Pada jangka pendek, cadangan devisa serta jumlah uang beredar (M2) signifikan mempengaruhi nilai tukar. Sedangkan, pada jangka panjang tingkat suku bunga SBI, jumlah uang beredar (M2), dan cadangan devisa signifikan mempengaruhi nilai tukar.³⁶

2. Persamaan dan Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Maghfiroh dan Tika Widiastuti

³⁶Duwik Tri Utami dan Fitrah Sari Utami, Pengaruh-Pengaruh Variabel Makro terhadap Nilai Tukar Rupiah, (Universitas Tidar: Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, 2021) Vol.6 No.2 September 2021. Hal.70.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh maghfiroh dan widiastuti memiliki persamaan yaitu pada variabel independen yang digunakan yaitu Inflasi.

Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel dependen yaitu menggunakan variabel Nilai Tukar Rupiah. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada penambahan variabel lainnya yaitu penambahan variabel independen nya Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Jumlah Uang yang Beredar.

Hasilnya Ketiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu SBIS, JUB, dan inflasi masing-masing menunjukkan nilai signifikan, sehingga dalam penelitian ini H_1 diterima H_0 ditolak. Berdasarkan hasil uji t, variabel SBIS dan JUB secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap nilai tukar rupiah atas dolar AS, sedangkan variabel inflasi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai tukar Rupiah atas dolar AS. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel independen yaitu SBIS, JUB dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel independen yaitu Nilai tukar rupiah atas dolar AS. Sebesar 94,5% variabel nilai tukar rupiah atas dolar AS dijelaskan oleh SBIS, JUB dan inflasi. Sedangkan sisanya yaitu 5,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.³⁷

³⁷Lailatul Maghfiroh dan Tika Widiastuti, Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Jumlah Uang Beredar (JUB), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar as Periode 2012-2017 Di Indonesia, (Universitas Airlangga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis,2019) Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 6 Juni 2019: 1196-1208. Hal.1207.

3. Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadhilah dan Raditya Sukmana

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah memiliki persamaan yaitu terletak pada variabel independen yaitu Inflasi.

Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada variabel dependennya yaitu Nilai Tukar Rupiah. Lalu perbedaan lainnya terletak pada penambahan variabel independen lainnya yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Jakarta Islamic Index (JII), dan Index Harga Saham Gabungan (ISHG).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variable memiliki pengaruh yang signifikan baik pada jangka panjang maupun jangka pendek, kecuali variable Inflasi yang hanya signifikan di jangka pendek pada keadaan tertentu. Dalam jangka pendek, variable JII, IHSG, dan SBIS berpengaruh signifikan negatif yang berarti meningkatnya variable tersebut akan menyebabkan Rupiah terapresiasi terhadap Dollar Amerika. Dalam jangka panjang variable JII dan SBIS juga bernilai negatif dan signifikan, sedangkan variable IHSG bernilai positif dan variable Inflasi bernilai negatif tidak signifikan.³⁸

4. Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mahrani

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahrani sama-sama menggunakan variable independen seperti Inflasi dan Produk Domestik

³⁸Nur Fadhilah dan Raditya Sukmana, Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Jakarta Islamic Index (JII), Tingkat Inflasi, Dan Index Harga Saham Gabungan (IHSG) Terhadap Nilai Tukar: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL), (Universitas Airlangga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017), Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 10 Oktober 2017: 833-846. Hal. 844.

Bruto (PDB), dan menggunakan 1 variable dependen yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Selain itu sama-sama menggunakan metode Kuantitatif. Dan juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Hasil penelitian yang didapat apakah inflasi dan PDB secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan tingkat signifikansi 5%. Secara parsial Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan berpengaruh positif terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah, sedangkan PDB Variabel secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah.³⁹

5. Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia yaitu memiliki persamaan pada variabel independen yaitu menggunakan variabel Produk Domestik Bruto dan memiliki variabel dependen Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada penambahan variabel independen lainnya yaitu Pembiayaan Perbankan dan Jumlah Uang yang Beredar.

Dari hasil penelitian diketahui menunjukkan dalam jangka panjang hanya variabel Pembiayaan Perbankan Syariah yang mempengaruhi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Sedangkan dalam jangka

³⁹ Sri Mahrani, *Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Tingkat Imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Tahun 2009-2012*, (Universitas Riau: Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, 2014) JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, Hal.13.

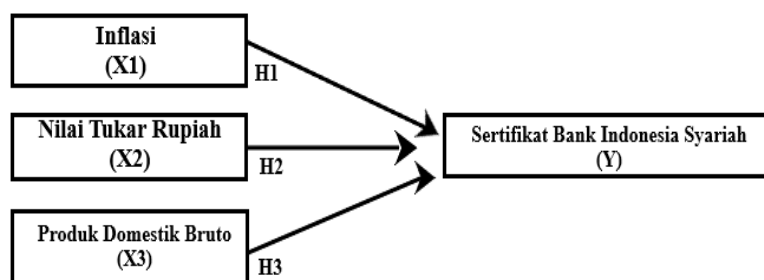
pendek, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dipengaruhi oleh Pembiayaan Perbankan Syariah dan Produk Domestik Bruto (PDB).⁴⁰

F. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka penelitian ini terdapat Variabel Independen atau Variabel X meliputi Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Produk Domestik Bruto. Sedangkan untuk Variabel Dependen atau variabel Y yaitu Surat Bank Indonesia Syariah.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Variabel X dan Variabel Y



Keterangan:

Model diatas dapat diartikan sebagai berikut: 1) Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Produk Domestik Bruto tidak dapat dianalisis karena posisinya sejajar.

1. Teori hubungan antara variabel X_1 terhadap Y

Didasarkan pada teori hubungan Utami dan Islami⁴¹ dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyani.⁴²

⁴⁰ Fitri Amalia, *Pengaruh Tingkat Pembiayaan Perbankan Syariah, JUB dan PDB Terhadap SBI Syariah Periode 2003-2013 Dengan Pendekatan ECM*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014) Vol. 8, No. 2, Desember 2014. Hal. 286.

2. Teori hubungan antara variabel X_2 terhadap Y

Didasarkan pada teori hubungan Maghfiroh dan Widiastuti⁴³ dengan penelitian terdahulu oleh Kewal.⁴⁴

3. Teori hubungan antara variabel X_3 terhadap Y

Didasarkan pada teori hubungan Mahrani⁴⁵ dengan memakai penelitian terdahulu oleh Budi LS.⁴⁶

Sedangkan Teori hubungan variabel X terhadap Y menurut buku adalah sebagai berikut:

1. Teori hubungan antara variabel X_1 terhadap Y

Didasarkan pada teori buku karya Boediono⁴⁷

2. Teori hubungan antara variabel X_2 terhadap Y

Didasarkan pada teori buku karya Putong⁴⁸

3. Teori hubungan antara variabel X_3 terhadap Y

⁴¹ Duwik Tri Utami dan Fitrah Sari Islami, Pengaruh-Pengaruh Variabel Makro terhadap Nilai Tukar Rupiah, (Universitas Tidar: Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, 2021) Vol.6 No.2 September 2021. Hal.70.

⁴² Mulyani, Neny. Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Jakarta Islamic Index, Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif Vol. 1 No. 1, artikel 10. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Terbuka. 2014. (tidak diterbitkan). Hal.44.

⁴³ Lailatul Maghfiroh dan Tika Widiastuti, Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Jumlah Uang Beredar (JUB), Dan Tingkat Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Atas Dollar As Periode 2012-2017 Di Indonesia, (Universitas Airlangga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019) Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 6 Juni 2019: 1196-1208. Hal.1207.

⁴⁴ Suramaya Suci Kewal, Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, dan pertumbuhan PDB terhadap indeks harga saham gabungan, (Jurnal Economia, 2012), Hal.24.

⁴⁵ Sri Mahrani, Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Tingkat Imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Tahun 2009-2012, (Universitas Riau: Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, 2014) JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, Hal.8.

⁴⁶ Chandra Budi Ls, Analisis Pengaruh Pendapatan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Variable Makroekonomi (Jumlah Uang Beredar, Nilai Tukar, Produk Domestik Bruto Dan Inflasi) Di Indonesia Periode 1990.I-2008.IV. (Tasik Malaya: Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, 2010), Hal.22.

⁴⁷ Boediono, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 2, Ekonomi Makro, edisi ke-4, (Yogyakarta:BPFE YOGYAKARTA, 1982), Hal.163.

⁴⁸ Iskandar Putong, Ekonomi Mikro dan Makro, Edisi Kedua. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002). Hal. 110.

Didasarkan pada teori buku karya Jhingan⁴⁹

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan suatu anggapan dari peneliti yang mendasar terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji. Jadi peneliti disini menganggap bahwa hipotesisnya ini benar. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H_0 : Diduga ada korelasi antara variabel Inflasi pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah periode 2008-2020.

H_1 : Diduga tidak ada korelasi antara variabel Inflasi pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah periode 2008-2020.

2. H_0 : Diduga ada korelasi antara variabel Nilai Tukar Rupiah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah periode 2008-2020.

H_1 : Diduga tidak ada korelasi antara variabel Nilai Tukar Rupiah pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah periode 2008-2020.

3. H_0 : Diduga ada korelasi antara variabel Produk Domestik Bruto pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah periode 2008-2020.

H_1 : Diduga tidak ada korelasi antara variabel Produk Domestik Bruto pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah periode 2008-2020.

⁴⁹M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2013), Hal.133-137.